



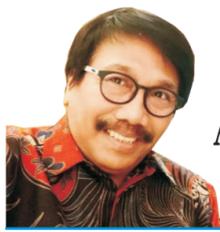
KUNJUNGAN PRABOWO KE ENAM NEGARA Indonesia Mitra Aktif di Kancan Global

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian lawatan kenegaraan ke enam negara dan telah kembali di Indonesia, Minggu (24/11) pagi pukul 05.30 WIB. Dalam unggahan Instagram @presidenrepublikindonesia, kemarin, rangkaian lawatan itu menjadi bukti, Indonesia merupakan mitra aktif bagi banyak negara di kancan global.

Melalui unggahan tersebut dijelaskan, kunjungan Presiden ke enam negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris dan Persatuan Emirat Arab (PEA) didapati banyak kesepakatan strategis dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan.

Langkah-langkah kemitraan tersebut dideskripsikan memberi banyak keuntungan untuk di Indonesia, di antaranya memperkuat kerja sama bilateral, mengamankan komitmen investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta penciptaan lapangan kerja.

* Bersambung hal 7 kol 3



Analisis Ancaman Pidana Money Politics

Dr Benediktus Hestu Cipto Handoyo SH MH

DEMOKRASI melalui penyelenggaraan pemilu yang adil, bebas, dan jujur merupakan pilar utama sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, idealisme demokrasi ini kerap dirusak oleh praktik money politics (politik uang), yang terus menghantui setiap kontestasi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Fenomena ini bukan hanya mencederai prinsip dasar demokrasi, tetapi juga melahirkan dampak sistemik yang mengancam keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:29	14:52	17:44	18:59	03:48

Senin, 25 November 2024
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY



Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kiri) berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

DIDUGA TERKAIT PUNGUTAN UNTUK PILKADA Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam terkait dugaan pungutan terhadap pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebanyak delapan orang yang terjaring dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen.

"Hingga saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (24/11).

Mengenai pemeriksaan, menurut Tessa Mahardhika, salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi.

Saat tiba di KPK, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

* Bersambung hal 7 kol 3

Jelang Pilkada Serentak Politik Uang Masih Marak

JAKARTA (KR) - Mendekati pelaksanaan pilkada serentak, Rabu (27/11) berbagai kalangan mengingatkan warga masyarakat pemilih untuk mewaspadai praktik politik uang yang masih marak, termasuk pada saat hari tenang.

"Hati-hati maraknya politik uang yang dilakukan dengan cara konvensional maupun digital. Modus politik uang tentu semakin canggih dan perlu menjadi perhatian serius Bawaslu RI," kata Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana, Minggu (24/11) soal masih banyaknya praktik politik uang menjelang pencoblosan pilkada.

Ia menilai, tipikal masyarakat terhadap politik uang dapat dikatakan permisif. Bahkan, ada sebagian setuju soal politik uang dan sebagian lainnya tidak setuju. "Diantara yang setuju tersebut akan memilih orang yang memberikan uang. Ini menunjukkan potensi politik uang tetap tinggi mempengaruhi pilihan pemilih," ujar Aditya yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and

Consulting ini.

Pihaknya memprediksi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tetap tinggi dan tidak jauh berbeda dengan pemilu lalu, yaitu sekitar 75 persen ke atas. Namun, yang perlu diperhatikan bagaimana pemilih tetap memiliki kemendiriannya dalam menentukan pilihan, bukan diarahkan atas dasar iming-iming material ataupun hal lainnya.

"Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi semua pihak (peserta pemilu, penyelenggara ataupun berbagai kelompok masyarakat)," katanya.

* Bersambung hal 7 kol 5

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● **KEPONAKAN** saya usia empat tahun melihat seekor anak ayam miliknya di kandang tidak gerak. Disangkanya mati, lalu ia memberi tahu ibunya. Pas akan diambil dan akan dikubur, anak ayam itu ternyata masih hidup. Keponakan mendadak kegirangan. (Herumawan Prasetyo Adhie, Jalan Wonosari Km 9 Sribit Kidul RT 01 RW 11, Sendangtirto Berbah Sleman 55573)-f

Wujudkan Pilkada Sehat dan Berintegritas, Komisi A DPRD DIY Ajak Masyarakat Tolak 'Money Politics'



FORUM DPRD DIY

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tinggal menghitung hari. Pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 ini menjadi momentum penting bagi masyarakat DIY untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Bertepatan dengan hari aktif, pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional, memberikan kesempatan luas bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya.

Sejak 25 November 2024, masa tenang kampanye resmi dimulai. Pada masa ini, pasangan calon kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, maupun wali kota/wakil wali kota, dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun, baik terbuka maupun tertutup. Selain itu, penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan menertibkan alat peraga kampanye (APK) untuk memastikan suasana tenang dan kondusif hingga hari pemungutan suara.

Peran Penting Masyarakat

Masa tenang memberikan waktu bagi masyarakat untuk merefleksikan pilihan mereka berdasarkan hati nurani. Dalam beberapa bulan terakhir, kampanye yang digelar pasangan calon di berbagai daerah

menjadi wadah penyampaian program kerja, visi, dan misi. Pilkada yang berintegritas tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk memilih berdasarkan penilaian yang objektif dan bukan karena tekanan, bujukan, atau politik uang.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, dalam sebuah wawancara kepada wartawan FX Haminanto di *Kedaulatan Rakyat* menyampaikan apresiasinya terhadap warga DIY yang telah menjaga suasana tetap kondusif selama masa kampanye.

Tantangan Dinamika Kependudukan dan Data Pemilih

Salah satu aspek krusial dalam setiap Pemilu atau Pilkada adalah akurasi data pemilih. Di DIY, Data Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada 21 September 2024. Namun, dalam dua bulan antara penetapan DPT dan hari pemungutan suara, dinamika kependudukan kerap memengaruhi validitas data tersebut.

Setidaknya terdapat tujuh peristiwa kependudukan yang memengaruhi DPT, di antaranya pemilih yang meninggal dunia, perpindahan penduduk masuk dan keluar DIY, pensiunnya anggota TNI dan Polri, hingga perubahan status akibat pernikahan atau perceraian.

Berikut penjelasan terkait masing-masing peristiwa dan dampaknya:

1. Pemilih Meninggal Dunia

Setelah penetapan DPT, kemungkinan ada warga yang terdaftar sebagai pemilih namun meninggal du-



Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam wawancara yang dipandu wartawan FX Haminanto menyampaikan pentingnya Pilkada di DIY yang berintegritas.

2. Pemilih Pindah Penduduk Keluar DIY

Perpindahan penduduk keluar dari DIY dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pekerjaan atau pendidikan. Jika seseorang pindah dan mencabut status kependudukannya di DIY, mereka otomatis menjadi warga daerah lain.

Untuk mengatasi hal ini, KPU harus melakukan sinkronisasi data dengan Dukcapil secara berkala untuk mencatat warga yang sudah tidak berhak memilih di DIY.

3. Pemilih Pindah Penduduk Masuk ke DIY

Sebaliknya, ada penduduk baru yang masuk ke wilayah DIY setelah penetapan DPT. Meskipun mereka secara administratif sudah menjadi warga DIY, nama mereka belum tercantum dalam DPT karena sebelumnya terdaftar sebagai pemilih di daerah asal. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DIY.

4. Pernikahan di Bawah Usia 17 Tahun

Menurut aturan, hak pilih diberikan kepada warga yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 17 tahun. Jika individu ini tidak terdaftar di DPT karena dianggap belum memenuhi usia, hak pilihnya menjadi terhambat.

5. Anggota TNI yang Pensiun

Anggota TNI yang masih aktif tidak memiliki hak pilih karena mereka diwajibkan netral. Namun, begitu pensiun, hak pilih mereka otomatis berlaku. Jika masa

pensiun terjadi dalam rentang waktu dua bulan setelah penetapan DPT, nama mereka belum terdaftar dalam daftar pemilih.

Terhadap kemungkinan ini, pemerintah perlu memberikan akses bagi pensiunan TNI untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan di TPS tempat mereka tinggal.

6. Anggota Polri yang Pensiun

Situasi ini serupa dengan TNI. Anggota Polri yang pensiun setelah penetapan DPT berhak untuk memilih, tetapi nama mereka mungkin belum masuk dalam daftar. KPU harus memverifikasi data pensiunan Polri dan memasukkan mereka ke dalam daftar tambahan agar dapat menggunakan hak pilihnya secara sah.

7. Perceraian

Perceraian kerap diikuti dengan perubahan data kependudukan, termasuk alamat tinggal. Jika salah satu pihak pindah keluar DIY setelah perceraian, nama mereka tetap tercantum dalam DPT DIY. Namun, mereka tidak lagi berhak

memilih di wilayah tersebut karena sudah menjadi penduduk daerah lain.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menekankan bahwa pihaknya telah mengundang KPU, Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Biro Tata Pemerintahan (Tapem) untuk memastikan data pemilih yang digunakan benar-benar akurat dan mutakhir.

"Jangan sampai setiap Pilkada atau Pemilu, masalahnya selalu berulang pada data pemilih. Ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada penyalahgunaan data yang dapat merusak integritas Pilkada," ujar Eko.

Selain data pemilih, distribusi logistik Pilkada juga menjadi perhatian. Proses pencetakan surat suara, pelipatan, hingga distribusinya sering kali luput dari pantauan publik. Padahal, tahap ini sangat menentukan kelancaran Pilkada. Penyalahgunaan, seperti surat suara rusak yang tetap dimasukkan ke dalam kotak suara, harus dicegah dengan pengawasan ketat dari penyelenggara dan pihak terkait.

Salah satu isu utama yang mengancam integritas Pilkada adalah politik uang. Praktik ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menciptakan pemimpin yang kurang kredibel.

Eko Suwanto mengajak masyarakat untuk memilih berdasarkan kesadaran penuh tanpa terpengaruh embel-embel materi. "Tidak ada ajaran agama yang mentolerir politik uang. Kesadaran ini harus terus dibangun bersama," tegasnya.

Berdasarkan pengamatan Eko Suwanto, kondisi politik di DIY menjelang Pilkada terbilang kondusif. Tidak ada konflik terbuka antar pasangan calon, dan kampanye lebih banyak berfokus pada adu gagasan

dan turun langsung ke masyarakat. Hal ini menunjukkan kedewasaan politik di DIY yang patut diapresiasi dan dipertahankan.

Pilkada serentak di DIY tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, partai politik, dan pasangan calon. Integritas Pilkada harus dijaga di setiap tahap, mulai dari penetapan data pemilih, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

Eko Suwanto juga mengingatkan pentingnya transparansi dan profesionalisme penyelenggara dalam menangani setiap tahapan Pilkada. Ia berharap KPU dapat memberikan penjelasan rinci terkait dinamika data pemilih, seperti penanganan surat undangan untuk pemilih yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan.

Ajakan untuk Partisipasi Aktif

Di akhir diskusi, Eko Suwanto mengajak seluruh warga DIY untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 dan menggunakan hak pilih sesuai keyakinan masing-masing.

"DIY salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, terlebih saat ini sudah memasuki masa libur akhir tahun. Mari bersama-sama menciptakan suasana kondusif agar wisatawan merasa nyaman dan Pilkada berjalan lancar," pungkaskannya.

Pilkada berintegritas adalah cerminan kualitas demokrasi suatu daerah. Dengan sinergi antara penyelenggara, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, DIY diharapkan dapat menjadi teladan dalam melaksanakan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran. (Awh/Fxh)-f



Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat
@Kedaulatdotcom



TikTok
KedaulatanRakyat
Kedaulatan rakyat Media